# PERATURAN BUPATI BIREUEN
# NOMOR 6 TAHUN 2014
# TENTANG
# KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BERBASIS AKRUAL



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2014

**BUPATI BIREUEN**

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

BERBASIS AKRUAL

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

b. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bireuen Berbasis Akrual.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Negara / Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;

.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.

4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten.

6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah Unit Kerja Pemerintah Kabupaten yang memunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

7. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran taransaksi dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta penyajian laporan keuangan.

8. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

9. SAP berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang, dan entitas dalam pelaporan financial berbasis akrual, serta mangakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBK.

10. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau di bayar.

11. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

12. Basis kas menuju akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan berbasi kas serta mengakui asset, utang dan ekuitas dana berbasis akrual.

13. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kritaria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.

14. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

15. Pengungkapan adalah laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna.

16. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

17. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan

keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

18. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

21. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

22. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

23. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah adalah SKPK/unit kerja pada SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

## BAB II
## KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN

### Pasal 2

(1) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipillih oleh

Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

(2) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

(3) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

(4) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, Transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode;

(5) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajianLaporan Peubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir;

(6) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Neraca yangmenyajikan informasi posisi Keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu untuk Pemerintah Kabupaten dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

(7) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus / deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

(8) Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah mengatur dasar-dasar penyajian laporan arus kas (LAK) yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas Pemerintah Kabupaten dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 12 Mei Tahun 2014

BUPATI BIREUEN,

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
tanggal 13 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2014 NOMOR 200

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

## A. UMUM

### 1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 istilah pendapatan, yakni Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

### 2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

b. Pendapatan Transfer,

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah,

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Pendapatan Asli Daerah | Pajak Daerah |
| | Retribusi Daerah |
| | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
| | Lain-lain PAD yang Sah |
| Pendapatan Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer | Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |

| | |
|---|---|
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya |
| | Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya |
| | Bantuan Keuangan |
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah | Pendapatan Hibah |
| | Dana Darurat |
| | Pendapatan Lainnya |

B. PENGAKUAN

Pendapatan LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh SKPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Dengan memperhatikan sumber, sifat dan prosedur penerimaan pendapatan maka pengakuan pendapatan dapat diklasifkasikan kedalam beberapa alternatif:

1. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu,dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan. Sedangkan untuk pendapatan LRA diakui ketika pembayaran telah dilakukan.
2. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan

perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO dan Pendapatan LRA ketika wajib pajak melakukan pembayaran pajak. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.

3. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui sedangkan pendapatan LRA diakui pada saat uang telah diterima.
4. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak *(self assessment)* dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LRA diakui ketika diterima pemerintah daerah. Sedangkan pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
5. Pengakuan pendapatan adalah pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Untuk pendapatan ini maka pengakuan pendapatan LO dan pengakuan pendapatan LRA pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.

C. PENGUKURAN

1. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
3. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
5. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

D. PENYAJIAN

Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.

**PEMERINTAH PROVINSI**
**LAPORAN OPERASIONAL**
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

| No | URAIAN | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KEGIATAN OPERASIONAL** | | | | |
| 1 | **PENDAPATAN** | | | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 8 | | | | | |
| 9 | **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | |
| 10 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 16 | | | | | |
| 17 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA** | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | **Jumlah Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 22 | | | | | |
| 23 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | |
| 24 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 26 | **Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 27 | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

Pendapatan LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi dalam BAS.

**PEMERINTAH PROVINSI**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|---|---|---|---|---|
| **PENDAPATAN** | | | | |
| **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | |
| Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | |
| **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | | | | |
| Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **Total Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | |
| Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| **Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

E. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

## A. UMUM

### 1. Definisi

Dalam Peraturan PemerintahNomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual *(full accrual accounting cycle).*

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkanbeban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanjamerupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Ada beberapaperbedaanantaraBebandanBelanja, yaitu:

| No | Beban | Belanja |
|---|---|---|
| a. | Diukurdandiakuidengan basis akuntansiakrual | Diukurdandiakuidengan basis akuntansikas |
| b | Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO) | MerupakanunsurpembentukLaporan RealisasiAnggaran (LRA) |
| c. | Menggunakan Kode Akun 9 | MenggunakanKodeAkun5 |

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRK, belanja sekretariat daerah kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat kabupaten.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

| BEBAN | KEWENANGAN |
|---|---|
| Beban Operasi – LO | |
| Beban Pegawai | SKPK |
| Beban Barang dan Jasa | SKPK |
| Beban Bunga | PPKD |

| | |
|---|---|
| Beban Subsidi | PPKD |
| Beban Hibah | PPKD&SKPK |
| Beban Bantuan Sosial | PPKD |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi | SKPK |
| Beban Penyisihan Piutang | SKPK |
| Beban Lain-Lain | SKPK |
| Beban Transfer | |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah | PPKD |
| Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | PPKD |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | PPKD |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | PPKD |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya | PPKD |
| Beban Transfer Dana Otonomi Khusus | PPKD |
| Defisit Non Operasional | PPKD |
| Beban Luar Biasa | PPKD |

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

| Belanja | Kewenangan |
|---|---|
| Belanja Tidak Langsung | |
| Belanja pegawai | SKPK |
| Belanja bunga | PPKD |
| Belanja subsidi | PPKD |
| Belanja hibah | PPKD |
| Belanja bantuan social | PPKD |
| Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa | PPKD |
| Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa | PPKD |
| Belanja Tidak Terduga | PPKD |
| Belanja Langsung | |
| Belanja pegawai | SKPK |
| Belanja barang dan jasa | SKPK |
| Belanja modal | SKPK |

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

| Belanja | Kewenangan |
|---|---|
| Belanja Operasi | |
| Belanja Pegawai | SKPK |
| Belanja Barang | SKPK |
| Bunga | PPKD |
| Subsidi | PPKD |
| Hibah (Uang, barang dan Jasa)*) | PPKD/SKPK |
| Bantuan Sosial (uang dan barang)*) | PPKD/SKPK |
| Belanja Modal | |
| Belanja Tanah | SKPK |
| Belanja Peralatan dan Mesin | SKPK |
| Belanja Gedung dan Bangunan | SKPK |
| Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | SKPK |
| Belanja Aset tetap lainnya | SKPK |
| Belanja Aset Lainnya | SKPK |
| Belanja Tak Terduga | |
| Belanja Tak Terduga | PPKD |
| | |

*) Hibah dan bantuan social berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan social berupa barang merupakan kewenangan SKPK.

B. PENGAKUAN

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1. Timbulnya kewajiban

   Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2. Terjadinya konsumsi aset

   Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

   Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPK dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPK dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPK.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Metode pendekatan Beban

   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.

2. Metode pendekatan Aset

   Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk

digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.

C. PENGUKURAN

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

Belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

D. PENILAIAN

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

# E. PENYAJIAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUENI**
**LAPORAN OPERASIONAL**
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

| No | URAIAN | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KEGIATAN OPERASIONAL** | | | | |
| 1 | **PENDAPATAN** | | | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 8 | | | | | |
| 9 | **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | |
| 10 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 16 | | | | | |
| 17 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA** | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | **Jumlah Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 22 | | | | | |
| 23 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | |
| 24 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 26 | **Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 27 | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 28 | | | | | |
| 29 | **BEBAN** | | | | |
| 30 | **BEBAN OPERASI** | | | | |
| 31 | Beban Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 32 | Beban Barang Jasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 33 | Beban Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 34 | Beban Subsisdi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 35 | Beban Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 36 | Beban Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 37 | Beban Penyusutan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 38 | Beban Lain-lain | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 39 | **Jumlah Beban Operasi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 40 | | | | | |
| 41 | **BEBAN TRANSFER** | | | | |
| 42 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 44 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 45 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 46 | Beban Transfer Keuangan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 47 | **Jumlah Beban Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 48 | **JUMLAH BEBAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 49 | | | | | |
| 50 | **JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 51 | | | | | |
| 52 | **SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** | | | | |
| 53 | **SURPLUS NON OPERASIONAL** | | | | |
| 54 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 55 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 56 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 57 | **Jumlah Surplus Non Operasional** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 58 | | | | | |
| 59 | **DEFISIT NON OPERASIONAL** | | | | |
| 60 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 61 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 62 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 63 | **Jumlah Defisit Non Operasional** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 64 | **JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 65 | | | | | |
| 66 | **SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 67 | | | | | |
| 68 | **POS LUAR BIASA** | | | | |
| 69 | **PENDAPATAN LUAR BIASA** | | | | |
| 70 | Pendapatan Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 71 | **Jumlah Pendapatan Luar Biasa** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 72 | | | | | |
| 73 | **BEBAN LUAR BIASA** | | | | |
| 74 | Beban Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 75 | **Jumlah Beban Luar Biasa** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 76 | **POS LUAR BIASA** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 77 | | | | | |
| 78 | **SURPLUS/ DEFISIT - LO** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**LAPORAN OPERASIONAL**
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

| No | URAIAN | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KEGIATAN OPERASIONAL** | | | | |
| 1 | **PENDAPATAN** | | | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 8 | | | | | |
| 9 | **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | |
| 10 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 16 | | | | | |
| 17 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA** | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | | | | | |
| 22 | **TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI** | | | | |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | **Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 26 | **Jumlah Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 27 | | | | | |
| 28 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | |
| 29 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 30 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 31 | **Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 32 | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 33 | | | | | |
| 34 | **BEBAN** | | | | |
| 35 | **BEBAN OPERASI** | | | | |
| 36 | Beban Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 37 | Beban Barang Jasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 38 | Beban Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 39 | Beban Subsisdi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 40 | Beban Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 41 | Beban Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 42 | Beban Penyusutan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 | Beban Lain-lain | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 44 | **Jumlah Beban Operasi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 45 | | | | | |
| 46 | **BEBAN TRANSFER** | | | | |
| 47 | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 48 | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 49 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 50 | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 51 | Beban Transfer Keuangan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 52 | **Jumlah Beban Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 53 | **JUMLAH BEBAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 54 | | | | | |
| 55 | **JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 56 | | | | | |
| 57 | **SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** | | | | |
| 58 | **SURPLUS NON OPERASIONAL** | | | | |
| 59 | Surplus Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 60 | Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 61 | Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 62 | **Jumlah Surplus Non Operasional** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 63 | | | | | |
| 64 | **DEFISIT NON OPERASIONAL** | | | | |
| 65 | Defisit Penjualan Aset Non Lancar | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 66 | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 67 | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 68 | **Jumlah Defisit Non Operasional** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 69 | **JUMLAH SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 70 | | | | | |
| 71 | **SURPLUS/ DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 72 | | | | | |
| 73 | **POS LUAR BIASA** | | | | |
| 74 | **PENDAPATAN LUAR BIASA** | | | | |
| 75 | Pendapatan Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 76 | **Jumlah Pendapatan Luar Biasa** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 77 | | | | | |
| 78 | **BEBAN LUAR BIASA** | | | | |
| 79 | Beban Luar Biasa | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 80 | **Jumlah Beban Luar Biasa** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 81 | **POS LUAR BIASA** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 82 | | | | | |
| 83 | **SURPLUS/ DEFISIT - LO** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PENDAPATAN** | | | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 8 | | | | | |
| 9 | **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | |
| 10 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 16 | | | | | |
| 17 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | **Total Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 22 | | | | | |
| 23 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | |
| 24 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 26 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 27 | **Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 28 | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 29 | **BELANJA** | | | | |
| 30 | **BELANJA OPERASI** | | | | |
| 31 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 32 | Belanja Barang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 33 | Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 34 | Subsidi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 35 | Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 36 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 37 | **Jumlah Belanja Operasi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 38 | | | | | |
| 39 | **BELANJA MODAL** | | | | |
| 40 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 41 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 42 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 44 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 45 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 46 | **Jumlah Belanja Modal** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 47 | | | | | |
| 48 | **BELANJA TAK TERDUGA** | | | | |
| 49 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 50 | **Jumlah Belanja Tak Terduga** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 51 | **Jumlah Belanja** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 52 | | | | | |
| 53 | **TRANSFER** | | | | |
| 54 | **TRANSFER/BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA** | | | | |
| 55 | Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 56 | Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 57 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 58 | **Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan ke Kab./Kota** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 59 | | | | | |
| 60 | **TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN** | | | | |
| 61 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 62 | Bantuan Keuangan Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 63 | **Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 64 | **Jumlah Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 65 | **JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 66 | | | | | |
| 67 | **SURPLUS/DEFISIT** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 68 | | | | | |
| 69 | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| 70 | | | | | |
| 71 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | | | |
| 72 | Penggunaan SiLPA | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 73 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 74 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 75 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 76 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 77 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 78 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 79 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 80 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 81 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 82 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 83 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 84 | **Jumlah Penerimaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 85 | | | | | |
| 86 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | | | |
| 87 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 94 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 88 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 89 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 90 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 91 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 92 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 93 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 95 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 96 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 97 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 98 | **Jumlah Pengeluaran** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 99 | **PEMBIAYAAN NETO** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 100 | | | | | |
| 101 | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

Penyajian belanja di Laporan Realisasi Anggaran:

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN BIREUEN**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PENDAPATAN** | | | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 8 | | | | | |
| 9 | **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | |
| 10 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 16 | | | | | |
| 17 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | | | | | |
| 22 | **TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI** | | | | |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | **Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 26 | **Total Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 27 | | | | | |
| 28 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | |
| 29 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 30 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 31 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 32 | **Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 33 | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 34 | | | | | |
| 35 | **BELANJA** | | | | |
| 36 | **BELANJA OPERASI** | | | | |
| 37 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 38 | Belanja Barang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 39 | Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 40 | Subsidi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 41 | Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 42 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 | **Jumlah Belanja Operasi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 44 | | | | | |
| 45 | **BELANJA MODAL** | | | | |
| 46 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 47 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 48 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 49 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 50 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 51 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 52 | **Jumlah Belanja Modal** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 53 | | | | | |
| 54 | **BELANJA TAK TERDUGA** | | | | |
| 55 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 56 | **Jumlah Belanja Tak Terduga** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 57 | **Jumlah Belanja** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 58 | | | | | |
| 59 | **TRANSFER** | | | | |
| 60 | **TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA** | | | | |
| 61 | Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 62 | Bagi Hasil Retribusi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 63 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 64 | **Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 65 | | | | | |
| 66 | **TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN** | | | | |
| 67 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 68 | Bantuan Keuangan Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 69 | **Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 70 | **Jumlah Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 71 | **JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 72 | | | | | |
| 73 | **SURPLUS/DEFISIT** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 74 | | | | | |
| 75 | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | | | |
| 78 | Penggunaan SiLPA | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 79 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 80 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 81 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 82 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 83 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 84 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 85 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 86 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 87 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 88 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 89 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 90 | **Jumlah Penerimaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 91 | | | | | |
| 92 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | | | |
| 93 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 94 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 95 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 96 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 97 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 98 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 99 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 100 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 101 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 102 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 103 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 104 | **Jumlah Pengeluaran** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 105 | **PEMBIAYAAN NETO** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 106 | | | | | |
| 107 | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

F. PENGUNGKAPAN

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

1. Rincian beban per SKPK.
2. Penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Rincian belanja per SKPK.
2. Penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
3. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

## A. UMUM

### 1. Definisi

a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

### 2. Klasifikasi

Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan antara lain:

a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
c. Transfer Pemerintah Provinsi.
d. Transfer/Bagi hasil ke Desa.
e. Transfer/Bantuan Keuangan.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

| Uraian | Laporan Realisasi Anggaran( LRA) | Laporan Operasional (LO) |
|---|---|---|
| Pendapatan Transfer | | |
| Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan | xxx | xxx |
| Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx |
| Dana Bagi hasil Sumber daya Alam | xxx | xxx |
| Dana Alokasi Umum | xxx | xxx |
| Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx |
| Transfer Pemerintah Pusat Lainnya | xxx | xxx |
| Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx |
| Dana Penyesuaian | xxx | xxx |
| Transfer Pemerintah Provinsi | xxx | xxx |
| Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx |
| Pendaptan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx |
| Beban Transfer | xxx | |
| Beban Transfer Bagi hasil Pajak | xxx | |
| Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya | xxx | |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya | xxx | |
| Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa | xxx | |
| Beban Transfer Keuangan Lainnya | xxx | |
| Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa | | xxx |
| Bagi Hasil Pajak | | xxx |
| Bagi Hasil Retribusi | | xxx |
| Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | | xxx |
| Transfer Bantuan Keuangan | | xxx |
| Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya | | xxx |
| Bantuan Keuangan Lainnya | | xxx |

B. PENGAKUAN

1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk.
2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

C. PENGUKURAN

1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

D. PENILAIAN

Trasnfer masuk dinilai sebagai berikut:

1. Transfer masuk dinilai berdasarkanazasbruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

E. PENYAJIAN

**PEMERINTAH PROVINSI**
**LAPORAN OPERASIONAL**
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam rupiah)

| No | URAIAN | 20X1 | 20X0 | Kenaikan/ Penurunan | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | **KEGIATAN OPERASIONAL** | | | | |
| 1 | **PENDAPATAN** | | | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 8 | | | | | |
| 9 | **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | |
| 10 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 16 | | | | | |
| 17 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA** | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | **Jumlah Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 22 | | | | | |
| 23 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | |
| 24 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 26 | **Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 27 | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

F. PENGUNGKAPAN

1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:
   a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
   b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:
   a. transfer keluar harus dirinci;
   b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;
   c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
   d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0**

(Dalam Rupiah)

| NO. | URAIAN | Anggaran 20X1 | Realisasi 20X1 | (%) | Realisasi 20X0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **PENDAPATAN** | | | | |
| 2 | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | | | | |
| 3 | Pendapatan Pajak Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 4 | Pendapatan Retribusi Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 5 | Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 6 | Lain-lain PAD yang Sah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 7 | **Jumlah Pendapatan Asli Daerah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 8 | | | | | |
| 9 | **PENDAPATAN TRANSFER** | | | | |
| 10 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN** | | | | |
| 11 | Dana Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 12 | Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 13 | Dana Alokasi Umum | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 14 | Dana Alokasi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 15 | **Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 16 | | | | | |
| 17 | **TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA** | | | | |
| 18 | Dana Otonomi Khusus | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 19 | Dana Penyesuaian | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | | | | | |
| 22 | **TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI** | | | | |
| 23 | Pendapatan Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 24 | Pendapatan Bagi Hasil Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 25 | **Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 26 | **Total Pendapatan Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 27 | | | | | |
| 28 | **LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH** | | | | |
| 29 | Pendapatan Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 30 | Pendapatan Dana Darurat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 31 | Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 32 | **Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 33 | **JUMLAH PENDAPATAN** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 34 | | | | | |
| 35 | **BELANJA** | | | | |
| 36 | **BELANJA OPERASI** | | | | |
| 37 | Belanja Pegawai | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 38 | Belanja Barang | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 39 | Bunga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 40 | Subsidi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 41 | Hibah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 42 | Bantuan Sosial | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 43 | **Jumlah Belanja Operasi** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 44 | | | | | |
| 45 | **BELANJA MODAL** | | | | |
| 46 | Belanja Tanah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 47 | Belanja Peralatan dan Mesin | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 48 | Belanja Gedung dan Bangunan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 49 | Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 50 | Belanja Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 51 | Belanja Aset Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 52 | **Jumlah Belanja Modal** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 53 | | | | | |
| 54 | **BELANJA TAK TERDUGA** | | | | |
| 55 | Belanja Tak Terduga | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 56 | **Jumlah Belanja Tak Terduga** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 57 | **Jumlah Belanja** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 58 | | | | | |
| 59 | **TRANSFER** | | | | |
| 60 | **TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA** | | | | |
| 61 | Bagi Hasil Pajak | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 62 | Bagi Hasil Retribusi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 63 | Bagi Hasil Pendapatan Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 64 | **Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 65 | | | | | |
| 66 | **TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN** | | | | |
| 67 | Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 68 | Bantuan Keuangan Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| 69 | **Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 70 | **Jumlah Transfer** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 71 | **JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 72 | | | | | |
| 73 | **SURPLUS/DEFISIT** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 74 | | | | | |
| 75 | **PEMBIAYAAN** | | | | |
| 76 | | | | | |
| 77 | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | | | | |
| 78 | Penggunaan SiLPA | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 79 | Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 80 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 81 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 82 | Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 83 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 84 | Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 85 | Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 86 | Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 87 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 88 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 89 | Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 90 | **Jumlah Penerimaan** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 91 | | | | | |
| 92 | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | | | | |
| 93 | Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 94 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 95 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 96 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 97 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 98 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 99 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 100 | Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 101 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 102 | Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 103 | Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xxx | xxx |
| 104 | **Jumlah Pengeluaran** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 105 | **PEMBIAYAAN NETO** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |
| 106 | | | | | |
| 107 | **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran** | **xxx** | **xxx** | **xxx** | **xxx** |

3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain:

   a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

   b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar;

   c. informasi lainnya yang diangggap perlu.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

## A. UMUM

### 1. Definisi

Berdasarkan Peraturan PemerintahanNomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 Paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan *(financing)* adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

### 2. Klasifikasi

Pembiayaandiklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada fihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

B. PENGAKUAN

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

C. PENGUKURAN

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengan Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran. Berikut adalah contoh penyajian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah.

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | Anggaran 20x1 | Realisasi 20x1 | % | Realisasi 20X0 |
|---|---|---|---|---|
| PEMBIAYAAN | | | | |
| PENERIMAAN PEMBIAYAAN | xxx | xxx | xx | xxx |
| Penggunaan SiLPA | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pencairan Dana Cadangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx | xx | xxx |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| Jumlah Penerimaan Pembiayaan | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| PENGELUARAN PEMBIAYAAN | | | | |
| Pembentukan Dana Cadangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pusat | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemda Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan | xxx | xxx | xx | xxx |
| Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pembay. Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keu. | xxx | xxx | xx | xxx |
| Bukan Bank | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya | xxx | xxx | xx | xxx |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx | xx | xxx |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara | | | | |
| Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | | | | |
| Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | | | | |
| Jumlah Pengeluaran | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| PEMBIAYAAN NETO | xxxx | xxxx | xx | xxxx |
| | | | | |
| Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | xxxx | xxxx | xx | xxxx |

## E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana

cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;

3. informasi lainnya yang diangggap perlu.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS

## A. UMUM

### 1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerahyang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yangwajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

### 2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum

daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran.Kas dan setara kas yang yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerahuntuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

| | | |
|---|---|---|
| Kas | Kas di Kas Daerah | Kas di Kas Daerah |
| | | Potongan Pajak dan Lainnya |
| | | Kas Transitoris |
| | | Kas Lainnya |
| | Kas di Bendahara Penerimaan | Pendapatan Yang Belum Disetor |
| | | Uang Titipan |
| | Kas di Bendahara Pengeluaran | Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU |
| | | Pajak di SKPK yang Belum Disetor |
| | | Uang Titipan |
| | Kas di BLUD | Kas Tunai BLUD |
| | | Kas di Bank BLUD |
| | | Pajak yang Belum Disetor BLUD |
| | | Uang Muka Pasien RSUD/BLUD |
| | | Uang Titipan BLUD |
| Setara Kas | Deposito (kurang dari 3 bulan) | Deposito (kurang dari 3 bulan) |
| | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan) | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan) |

B. PENGUKURAN

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

C. PENYAJIAN

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| ASET | | |
| ASET LANCAR | | |
| Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| Kas di BLUD | xxx | xxx |
| Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| Piutang Pajak | xxx | xxx |
| Jumlah Aset Lancar | xxx | xxx |

D. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG

## A. UMUM

### 1. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalahhak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan

penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Pungutan

Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:

1. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Provinsi;
2. Piutang Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Piutang Retribusi;
4. PiutangPendapatanAsliDaerahLainnya.

b. Perikatan

Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:

1) Pemberian Pinjaman;
2) Penjualan;
3) Kemitraan;
4) Pemberian fasilitas.

c. Transfer antar Pemerintahan

Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:

1) Piutang Dana Bagi Hasil;
2) Piutang Dana Alokasi Umum;
3) Piutang Dana Alokasi Khusus;
4) Piutang Dana Otonomi Khusus;
5) Piutang Transfer Lainnya;
6) PiutangBagiHasilDariProvinsi;
7) Piutang Transfer Antar Daerah;
8) Piutang Kelebihan Transfer.

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas:

1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;
2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Piutang Pendapatan | Piutang Pajak Daerah |
| | Piutang Retribusi |
| | Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan |
| | Piutang Lain-lain PAD yang Sah |
| | Piutang Transfer Pemerintah Pusat |
| | Piutang Transfer Pemerintah Lainnya |
| | Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya |
| | Piutang Pendapatan Lainnya |
| Piutang Lainnya | Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang |
| | Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya |
| | Uang Muka |

B. PENGAKUAN

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

Piutang dapat diakui ketika:

1. diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau

2. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

1. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
2. jumlah piutang dapat diukur;
3. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
4. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh

Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah difinitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Provinsi yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Provinsi belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.

Transferantar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif

menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

## C. PENGUKURAN

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

1. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh

Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;atau

3. disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

1. Pemberian pinjaman

   Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut.

   Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

2. Penjualan

   Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

3. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

4. Pemberian fasilitas/jasa

   Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
2. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke kabupaten;
3. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
2. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan *(write-off)* dan penghapusbukuan *(write down).* Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari *intrakomptabel* menjadi *ekstrakomptabel* agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

D. PENILAIAN

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas

piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

1. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
2. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
   c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau

c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak likuid; dan/atau
   d. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
   a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
   c. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
   a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
   b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
   c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
   d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;

3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

| No. | Kualitas Piutang | Taksiran Piutang Tak Tertagih |
|---|---|---|
| 1. | Lancar | 0,5 % |
| 2. | Kurang Lancar | 10 % |
| 3. | Diragukan | 50 % |
| 4. | Macet | 100 % |

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
2. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka

dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

E. PENYAJIAN

Piutang disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Berikut adalah contoh penyajian piutang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**NERACA**
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ASET** | | |
| 2 | | | |
| 3 | **ASET LANCAR** | | |
| 4 | Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| 6 | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| 7 | Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| 8 | **Piutang Pajak** | xxx | xxx |
| 9 | **Piutang Retribusi** | xxx | xxx |
| 10 | **Penyisihan Piutang** | xxx | xxx |
| 11 | **Belanja Dibayar Dimuka** | (xxx) | (xxx) |
| 12 | **Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara** | xxx | xxx |
| 13 | **Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah** | xxx | xxx |
| 14 | **Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat** | xxx | xxx |
| 15 | **Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya** | xxx | xxx |
| 16 | **Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran** | xxx | xxx |
| 17 | **Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi** | xxx | xxx |
| 18 | **Piutang Lainnya** | xxx | xxx |
| 19 | Persediaan | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | | | |
| 22 | INVESTASI JANGKA PANJANG | | |
| 23 | Investasi Nonpermanen | | |
| 24 | Pinjaman Jangka Panjang | xxx | xxx |
| 25 | Investasi dalam Surat Utang Negara | xxx | xxx |
| 26 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | xxx | xxx |
| 27 | Investasi Nonpermanen Lainnya | xxx | xxx |
| 28 | **Jumlah Investasi Nonpermanen (24 s/d 27)** | **xxx** | **xxx** |
| 29 | Investasi Permanen | | |
| 30 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| 31 | Investasi Permanen Lainnya | xxx | xxx |
| 32 | **Jumlah Investasi Permanen (30 s/d 31)** | **xxx** | **xxx** |
| 33 | **Jumlah Investasi Jangka Panjang (28 + 32)** | **xxx** | **xxx** |
| 34 | | | |
| 35 | ASET TETAP | | |
| 36 | Tanah | xxx | xxx |
| 37 | Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| 38 | Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| 39 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx |
| 40 | Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| 41 | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx | xxx |
| 42 | Akumulasi Penyusutan | (xxx) | (xxx) |
| 43 | **Jumlah Aset Tetap (36 s/d 42)** | **xxx** | **xxx** |
| 44 | | | |
| 45 | DANA CADANGAN | | |
| 46 | Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 47 | **Jumlah Dana Cadangan (46)** | **xxx** | **xxx** |
| 48 | | | |
| 49 | ASET LAINNYA | | |
| 50 | Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| 51 | Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 52 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxx | xxx |
| 53 | Aset Tak Berwujud | xxx | xxx |
| 54 | Aset Lain-lain | xxx | xxx |
| 55 | **Jumlah Aset Lainnya (50 s/d 54)** | **xxx** | **xxx** |
| 56 | | | |
| 57 | **JUMLAH ASET (20+33+43+47+55)** | **xxx** | **xxx** |

F. PENGUNGKAPAN

Piutangdisajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. jaminan atau sita jaminan jika ada. Khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapus bukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN

A. UMUM

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

B. PENGAKUAN

1. Pengakuan Persediaan

Persediaandiakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

2. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan asset dan pendekatan beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai ataudi konsumsi. Pendekatan asset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPK.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

3. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaanan taracatatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

C. PENGUKURAN

Persediaan disajikan sebesar:

1. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, danlainnya yang serupamengurangibiayaperolehan.
2. Harga pokok produk siapa bila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama.

D. SISTEM PENCATATAN PERSEDIAAN

Persediaan dicatat dengan metode perpetual.

1. Metode Perpetual

Dalam metode perpetual, fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan setiap ada persediaan yang masuk maupun keluar. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan

operasional utama di SKPK dan membutuhkan pengendalian yang kuat. Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, persediaan pupuk di dinas pertanian, dan lain sebagainya. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

E. PENYAJIAN

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Bireuen.

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**NERACA**
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| **Aset** | | |
| Aset Lancar | | |
| Kas Di Kas Daerah | xxx | xxx |
| Kas Di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| Kas Di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| Piutang Pajak | xxx | xxx |
| Piutang Retribusi | xxx | xxx |
| Penyisihan Piutang | (xxx) | (xxx) |
| Belanja Dibayar Dimuka | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| Piutang Lainnya | xxx | xxx |
| ***Persediaan*** | ***xxx*** | ***xxx*** |
| **Jumlah Aset Lancar** | **xxx** | **xxx** |

F. PENGUNGKAPAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;

2. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI

## A. UMUM

### 1. Definisi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerahdalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

### 2. Klasifikasi

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Pos-pos investasimenurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 06tentang Investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi

dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

   Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2. Investasi Jangka Panjang Permanen

   Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi diklasifikasikan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Investasi Jangka Pendek | Investasi dalam Saham |
| | Investasi dalam Deposito |
| | Investasi dalam SUN |
| | Investasi dalam SBI |
| | Investasi dalam SPN |
| | Investasi Jangka Pendek BLUD |
| | Investasi Jangka Pendek Lainnya |
| Investasi Jangka Panjang Non Permanen | Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara |
| | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah |
| | Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta |
| | Investasi dalam Obligasi |
| | Investasi dalam Proyek Pembangunan |
| | Dana Bergulir |

| | |
|---|---|
| | Deposito Jangka Panjang |
| | Investasi Non Permanen Lainnya |
| Investasi Jangka Panjang Permanen | Penyertaan Modal Kepada BUMN |
| | Penyertaan Modal Kepada BUMD |
| | Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta |
| | Investasi Permanen Lainnya |

B. PENGAKUAN

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
2. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi. Untuk pengakuan investasi jangka pendek, jurnal tersebut mencatat investasijangka pendek di debit dan kasdi kas daerah di kredit(jika tunai) berdasarkan dokumen sumber yang relevan.Sementara itu, untuk pengakuan investasi jangka panjang, jurnal tersebut mencatat investasi jangka panjang di debit dan kas di kas daerahdi kredit (jika tunai). Selain itu, untuk investasi jangka panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerahdi debit dan perubahan SAL di kredit.

C. PENGUKURAN

Pengukuran investasi berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan pengukuran investasi untuk masing-masing jenis.

1. Pengukuran investasi jangka pendek:

   a. Investasi dalam bentuk surat berharga:
      1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehan yang di dalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.
      2) Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
   b. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

2. Pengukuran investasi jangka panjang:

   a. Investasi permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
   b. Investasi nonpermanen:
      1) investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.
      2) investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
      3) penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

3. Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

4. Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

D. METODE PENILAIAN INVESTASI

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1. Metode biaya

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2. Metode ekuitas

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentasi kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

   Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.
d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan sahambukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metodepenilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh(*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*,

antara lain:

1. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
2. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
3. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksiperusahaan *investee*;
4. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalamrapat/pertemuan dewan direksi.

## E. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar, sedangkan investasi jangka panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Nonpermanen dan Investasi Permanen. Berikut adalah contoh penyajian investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**NERACA**

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| **ASET LANCAR** | | |
| Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| Piutang Pajak | xxx | xxx |
| **Jumlah Aset Lancar** | **xxx** | **xxx** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | |
| Investasi Nonpermanen | | |
| Pinjaman Kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| Investasi dalam Surat Utang Negara | xxx | xxx |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | xxx | xxx |
| Investasi Nonpermanen Lainnya | xxx | xxx |
| **Jumlah Investasi Nonpermanen** | **xxx** | **xxx** |
| Investasi Permanen | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| Investasi Permanen Lainnya | xxx | xxx |
| **Jumlah Investasi Permanen** | **xxx** | **xxx** |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **xxx** | **xxx** |

F. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnyamengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

## A. UMUM

### 1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

### 2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedangdalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belumselesai seluruhnya.

B. PENGAKUAN

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depandapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapatdiakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. berwujud;
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Memenuhi kriteria material/batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Tanah | 1 |
| 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 5.000.000,- |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 1.500.000,- |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | 600.000,- |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 1.000.000,- |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | |
| | - Alat-alat Kantor | 500.000,- |
| | - Alat-alat Rumah Tangga | 300.000,- |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 500.000,- |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 1.600.000,- |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | 1.000.000,- |
| 2.9 | Alat Keamanan | 1.000.000,- |
| 3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: | |
| 3.1 | Bangunan Gedung | 10.000.000,- |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 10.000.000,- |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yg terdiri atas: | |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 10.000.000,- |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 10.000.000,- |
| 4.3 | Instalasi | 10.000.000,- |

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|---|---|---|
| 4.4 | Jaringan | 10.000.000,- |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | 100.000,- |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga | 200.000,- |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 500.000,- |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1 |

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai persediaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

C. PENGUKURAN ASET TETAP

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaianaset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkanmaka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatupengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksipihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenagakerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelolameliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidaklangsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenagalistrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan denganpembangunan aset tetap tersebut.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebutadalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap. Aset-aset tersebut diperlakukan sebagai persediaan.

Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Tanah | 5.000.000,- |
| 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | 1.500.000,- |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 600.000,- |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 1.000.000,- |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 500.000,- |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 300.000,- |
| | - Alat-alat Kantor | 500.000,- |
| | - Alat-alat Rumah Tangga | 1.600.000,- |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000,- |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 1.000.000,- |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | |
| 2.9 | Alat Keamanan | 10.000.000,- |
| 3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: | 10.000.000,- |
| 3.1 | Bangunan Gedung | |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 10.000.000,- |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: | 10.000.000,- |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 10.000.000,- |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 5.000.000,- |
| 4.3 | Instalasi | 1.500.000,- |
| 4.4 | Jaringan | 10.000.000,- |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | 100.000,- |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga | 200.000,- |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 500.000,- |
| 6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 1 |

1. Komponen Biaya

   Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya ataukonstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapatdiatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisiyang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yangdimaksudkan.

   Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatukomponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikansecara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisikerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untukmembawa aset ke kondisi kerjanya.

   Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari hargapembelian.

2. KonstruksiDalamPengerjaan

   Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi danatau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belumselesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalampengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

3. Perolehan Secara Gabungan

   Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperolehsecara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungantersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yangbersangkutan.

4. PertukaranAset

   Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran ataupertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biayadari pos

semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperolehyaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikandengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yangditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatuaset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilaiwajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukarandengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak adakeuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yangbaru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas asetyang dilepas.

5. AsetDonasi

   Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harusdicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

6. Pengeluaran Setelah Perolehan

   Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yangmemperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberimanfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilaitercatat aset yang bersangkutan.

   Kriteria seperti pada paragraph diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak. Berikut ini adalah batasan jumlah biaya untuk penentuan kapitalisasi:

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Tanah | 5.000.000,- |
| 2 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | 1.500.000,- |
| 2.1 | Alat-alat Berat | 600.000,- |
| 2.2 | Alat-alat Angkutan | 1.000.000,- |
| 2.3 | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | |
| 2.4 | Alat-alat Pertanian/Peternakan | 500.000,- |
| 2.5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 300.000,- |
| | - Alat-alat Kantor | 500.000,- |
| | - Alat-alat Rumah Tangga | 1.600.000,- |
| 2.6 | Alat Studio dan Alat Komunikasi | 1.000.000,- |
| 2.7 | Alat-alat Kedokteran | 1.000.000,- |
| 2.8 | Alat-alat Laboratorium | |
| 2.9 | Alat Keamanan | 10.000.000,- |
| 3 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas: | 10.000.000,- |
| 3.1 | Bangunan Gedung | |
| 3.2 | Bangunan Monumen | 10.000.000,- |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang terdiri atas: | 10.000.000,- |
| 4.1 | Jalan dan Jembatan | 10.000.000,- |
| 4.2 | Bangunan Air/Irigasi | 5.000.000,- |
| 4.3 | Instalasi | 1.500.000,- |
| 4.4 | Jaringan | 10.000.000,- |
| 5 | Aset Tetap Lainnya, yang terdiri atas: | |
| 5.1 | Buku dan Perpustakaan | 100.000,- |
| 5.2 | Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga | 200.000,- |
| 5.3 | Hewan/Ternak dan Tumbuhan | 500.000,- |

Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi disajikan pada tabel berikut.

| URAIAN | JENIS | Persentase Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan) | Penambahan Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|
| Alat Besar | | | |
| Alat Besar Darat | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | | |
| Alat Besar Apung | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | >45% s.d 65% | 4 |
| | | | |
| Alat Bantu | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 2 |
| | | >45% s.d 65% | 4 |
| | | | |
| Alat Angkutan | | | |
| Alat Angkutan Darat Bermotor | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| Alat Angkutan Darat Tak Bermotor | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 1 |
| | | | |
| Alat Angkutan Apung Bermotor | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 6 |
| | | | |
| Alat Angkutan Apung Tak Bermotor | Renovasi | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Alat Angkutan Bermotor Udara | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 6 |
| | | >50% s.d 75% | 9 |
| | | >75% s.d.100% | 12 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alat Bengkel dan Alat Ukur | | | |
| Alat Bengkel Bermesin | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Alat Bengkel Tak ber Mesin | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 1 |
| | | | |
| Alat Ukur | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat Pertanian | | | |
| Alat Pengolahan | *Overhaul* | >0% s.d. 20% | 1 |
| | | >21% s.d 40% | 2 |
| | | >51% s.d 75% | 5 |
| | | | |
| Alat Kantor dan Rumah Tangga | | >0% s.d. 25% | 0 |
| Alat Kantor | *Overhaul* | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat Rumah Tangga | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| Alat Studio | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat Komunikasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Peralatan Pemancar | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Peralatan Komunikasi Navigasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 9 |
| | | | |
| Alat Kedokteran dan Kesehatan | | | |
| Alat Kedokteran | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat Kesehatan Umum | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat laboratorium | | | |
| Unit Alat laboratorium | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 8 |
| | | | |
| Alat Laboratorium Fisika | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 8 |
| | | | |
| Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| | | | |
| Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| | | | |
| Alat laboratorium Lingkungan Hidup | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Peralatan Laboratorium | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Hidrodinamica | | | |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 8 |
| Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| | | | |
| Alat Persenjataan | | | |
| Senjata Api | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Persenjataan Non Senjata Api | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 1 |
| | | | |
| Senjata Sinar | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 0 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Alat Khusus Kepolisian | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Komputer | | | |
| Komputer Unit | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Peralatan Komputer | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Alat Eksplorasi | | | |
| Alat Eksplorasi Topografi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat Eksplorasi Geofisika | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alat Pengeboran | | | |
| Alat Pengeboran Mesin | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| | | | |
| Alat Pengeboran Non Mesin | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian | | | |
| Sumur | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Produksi | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Pengolahan dan Pemurnian | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 3 |
| | | >25% s.d 50% | 5 |
| | | >50% s.d 75% | 7 |
| | | >75% s.d.100% | 8 |
| | | | |
| Alat Bantu Explorasi | | | |
| Alat Bantu Explorasi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| | | | |
| Alat Bantu Produksi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 6 |
| | | >75% s.d.100% | 7 |
| | | | |
| Alat keselamatan Kerja | | | |
| Alat Deteksi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 3 |
| | | | |
| Alat Pelindung | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 0 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Alat Sar | Renovasi | >0% s.d. 25% | 0 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 1 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alat Kerja Penerbang | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 6 |
| | | | |
| Alat Peraga | | | |
| Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 4 |
| | | >50% s.d 75% | 5 |
| | | >75% s.d.100% | 5 |
| | | | |
| Peralatan Proses / Produksi | | | |
| Unit Peralatan Proses / Produksi | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 2 |
| | | >25% s.d 50% | 3 |
| | | >50% s.d 75% | 4 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Rambu-rambu | | | |
| Rambu-rambu Lalu lintas Darat | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 3 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Rambu-rambu Lalu lintas Udara | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 2 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 4 |
| | | | |
| Rambu-rambu Lalu lintas Laut | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Peralatan Olah Raga | | | |
| Peralatan Olah Raga | Renovasi | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d.100% | 2 |
| | | | |
| Bangunan Gedung | | | |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja | Renovasi | >0% s.d. 25% | 5 |
| | | >25% s.d 50% | 10 |
| | | >50% s.d 75% | 15 |
| | | >75% s.d.100% | 50 |
| | | | |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| Monumen | | | |
| Candi/ Tugu Peringatan / Prasasti | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Bangunan Menara | | | |
| Bangunan Menara Perambuan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Tugu Titik Kontrol / Prasasti | | | |
| Tugu / Tanda batas | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Jalan dan Jembatan | | | |
| Jalan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 60% | 5 |
| | | >60% s.d 100% | 10 |
| | | | |
| Jembatan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Bangunan Air | | | |
| Bangunan Air Irigasi | Renovasi | >0% s.d. 5% | 2 |
| | | >5% s.d 10% | 5 |
| | | >10% s.d 20% | 10 |
| | | | |
| Bangunan Pengairan Pasang Surut | Renovasi | >0% s.d. 5% | 2 |
| | | >5% s.d 10% | 5 |
| | | >10% s.d 20% | 10 |
| | | | |
| Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder | Renovasi | >0% s.d. 5% | 1 |
| | | >5% s.d 10% | 3 |
| | | >10% s.d 20% | 5 |
| | | | |
| Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana alam | Renovasi | >0% s.d. 5% | 1 |
| | | >5% s.d 10% | 2 |
| | | >10% s.d 20% | 3 |
| | | | |
| Bangunan Pengembangan Sumber air dan Tanah | Renovasi | >0% s.d. 5% | 1 |
| | | >5% s.d 10% | 2 |
| | | >10% s.d 20% | 3 |
| | | | |
| Bangunan Air Bersih/Air | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Baku | | | |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Bangunan Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Instalasi | | | |
| Instalasi Air Bersih/Air baku | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | |
| Instalasi Air Kotor | Renovasi | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | |
| Instalasi Pengelolahan Sampah | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | | |
| Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | | |
| Instalasi Pembangkit Listrik | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Instalasi gardu Listrik | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Instalasi Pertahanan | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 3 |
| | | >45% s.d 65% | 5 |
| | | | |
| Instalasi gas | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Instalasi Pengaman | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 1 |
| | | >45% s.d 65% | 3 |
| | | | |
| Instalasi Lain | Renovasi | >0% s.d. 30% | 1 |
| | | >30% s.d 45% | 1 |
| | | >45% s.d 65% | 3 |
| Jaringan | | | |
| Jaringan air Minum | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jaringan Listrik | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Jaringan Telepon | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 5 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | |
| Jaringan Gas | *Overhaul* | >0% s.d. 30% | 2 |
| | | >30% s.d 45% | 7 |
| | | >45% s.d 65% | 10 |
| | | | |
| Alat Musik Modern/Band | *Overhaul* | >0% s.d. 25% | 1 |
| | | >25% s.d 50% | 1 |
| | | >50% s.d 75% | 2 |
| | | >75% s.d 100% | 2 |
| | | | |
| ASET TETAP DALAM RENOVASI | | | |
| Peralatan dan Mesin dalam renovasi | *Overhaul* | >0% s.d. 100% | 2 |
| | | | |
| Gedung dan bangunan dalam Renovasi | Renovasi | >0% s.d. 30% | 5 |
| | | >30% s.d 45% | 10 |
| | | >45% s.d 65% | 15 |
| | | | |
| Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi | Renovasi /Overhaul | >0% s.d. 100% | 5 |

7. Pengukuran berikutnya terhadapPengakuanAwal

   Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetaptersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yangmemungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan denganpenyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

8. Penyusutan

   Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatuaset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaataset yang bersangkutan.

   Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagaipengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutandalam laporan operasional.

Metode penyusutan dipergunakan adalah Metode garis lurus *(straight line method).*

Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap adalah sebagai berikut:

| Kodifikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | ASET TETAP | |
| 1 | 3 | 2 | | Peralatan dan Mesin | |
| 1 | 3 | 2 | 01 | Alat-Alat Besar Darat | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 02 | Alat-Alat Besar Apung | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 03 | Alat-alat Bantu | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 04 | Alat Angkutan Darat Bermotor | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 05 | Alat Angkutan Berat Tak Bermotor | 2 |
| 1 | 3 | 2 | 06 | Alat Angkut Apung Bermotor | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 07 | Alat Angkut Apung Tak Bermotor | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 08 | Alat Angkut Bermotor Udara | 20 |
| 1 | 3 | 2 | 09 | Alat Bengkel Bermesin | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 10 | Alat Bengkel Tak Bermesin | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 11 | Alat Ukur | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 12 | Alat Pengolahan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 13 | Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 14 | Alat Kantor | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 15 | Alat Rumah Tangga | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | Peralatan Komputer | 4 |
| 1 | 3 | 2 | 17 | Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 18 | Alat Studio | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 19 | Alat Komunikasi | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 20 | Peralatan Pemancar | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 21 | Alat Kedokteran | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 22 | Alat Kesehatan | 5 |
| 1 | 3 | 2 | 23 | Unit-Unit Laboratorium | 8 |
| 1 | 3 | 2 | 24 | Alat Peraga/Praktek Sekolah | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 25 | Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 26 | Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 27 | Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan | 10 |

| Kodifikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 28 | Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM) | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 29 | Alat Laboratorium Lingkungan Hidup | 7 |
| 1 | 3 | 2 | 30 | Peralatan Laboratorium Hidrodinamika | 15 |
| 1 | 3 | 2 | 31 | Senjata Api | 10 |
| 1 | 3 | 2 | 32 | Persenjataan Non Senjata Api | 3 |
| 1 | 3 | 2 | 33 | Alat Keamanan dan Perlindungan | 5 |
| 1 | 3 | 3 | | Gedung dan Bangunan | |
| 1 | 3 | 3 | 01 | Bangunan Gedung Tempat Kerja | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 02 | Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 03 | Bangunan Menara | 40 |
| 1 | 3 | 3 | 04 | Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 05 | Tugu Peringatan | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 06 | Candi | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 07 | Monumen/Bangunan Bersejarah | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 08 | Tugu Peringatan Lain | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 09 | Tugu Titik Kontrol/Pasti | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 10 | Rambu-Rambu | 50 |
| 1 | 3 | 3 | 11 | Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara | 50 |
| 1 | 3 | 4 | | Jalan, Irigasi, dan Jaringan | |
| 1 | 3 | 4 | 01 | Jalan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 02 | Jembatan | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 03 | Bangunan Air Irigasi | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 04 | Bangunan Air Pasang Surut | 50 |
| 1 | 3 | 4 | 05 | Bangunan Air Rawa | 25 |
| 1 | 3 | 4 | 06 | Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 07 | Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 08 | Bangunan Air Bersih/Baku | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 09 | Bangunan Air Kotor | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 10 | Bangunan Air | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 11 | Instalasi Air Minum/Air Bersih | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 12 | Instalasi Air Kotor | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 13 | Instalasi Pengolahan Sampah | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 14 | Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan | 10 |
| 1 | 3 | 4 | 15 | Instalasi Pembangkit Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 16 | Instalasi Gardu Listrik | 40 |

| Kodifikasi | | | | Uraian | Masa Manfaat (Tahun) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 17 | Instalasi Pertahanan | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 18 | Instalasi Gas | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 19 | Instalasi Pengaman | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 20 | Jaringan Air Minum | 30 |
| 1 | 3 | 4 | 21 | Jaringan Listrik | 40 |
| 1 | 3 | 4 | 22 | Jaringan Telepon | 20 |
| 1 | 3 | 4 | 23 | Jaringan Gas | 30 |

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh asettetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

9. Aset Bersejarah

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlahunit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas LaporanKeuangan dengan tanpa nilai.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harusdibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinyapengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsunguntuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

10. Penghentian danPelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan ataubila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak adamanfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harusdieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas LaporanKeuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerahtidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos asetlainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

D. PENYAJIAN

Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**NERACA**
NERACA ASET TETAP

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| **ASET LANCAR** | | |
| Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| Piutang Pajak | xxx | xxx |
| Piutang Retribusi | xxx | xxx |
| Penyisihan Piutang | xxx | xxx |
| Belanja Dibayar Dimuka | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| Piutang Lainnya | xxx | xxx |
| Persediaan | xxx | xxx |
| **Jumlah Aset Lancar** | **xxx** | **xxx** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | |
| **Investasi Nonpermanen** | | |
| Pinjaman Jangka Panjang | xxx | xxx |
| Investasi dalam Surat Utang Negara | xxx | xxx |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | xxx | xxx |
| Investasi Nonpermanen Lainnya | xxx | xxx |
| **Jumlah Investasi Nonpermanen** | **xxx** | **xxx** |
| **Investasi Permanen** | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| Investasi Permanen Lainnya | xxx | xxx |
| **Jumlah Investasi Permanen** | **xxx** | **xxx** |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **xxx** | **xxx** |
| **ASET TETAP** | | |
| Tanah | xxx | xxx |
| Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx |
| Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx | xxx |
| Akumulasi Penyusutan | xxx | xxx |
| **Jumlah Aset Tetap** | **xxx** | **xxx** |
| **DANA CADANGAN** | | |
| Dana Cadangan | xxx | xxx |
| **Jumlah Dana Cadangan** | **xxx** | **xxx** |
| **ASET LAINNYA** | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxx | xxx |
| Aset Tak Berwujud | xxx | xxx |
| Aset Lain-lain | xxx | xxx |
| **Jumlah Aset Lainnya** | **xxx** | **xxx** |
| **JUMLAH ASET** | **xxx** | **xxx** |

E. PENGUNGKAPAN

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat(*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yangmenunjukkan:
   a) Penambahan;
   b) Pelepasan;
   c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
   d) Mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan, meliputi:
   a) Nilai penyusutan;
   b) Metode penyusutan yang digunakan;
   c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
   d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhirperiode;
4. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
   a) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
   b) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
   c) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
   d) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
5. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

## A. UMUM

### 1. Definisi

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

### 2. Klasifikasi

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta asset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehantersebut biasanya kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan asset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

## B. PENGAKUAN KONSTRUKSI DALAMPENGERJAAN

Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

1. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh;
2. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
3. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam asset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos asset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
2. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke asset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; asset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

## C. PENGUKURAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

1. biaya yang berhubunganlangsungdengankegiatankonstruksi;
2. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
3. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

1. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
2. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
3. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;

4. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
5. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:

1. asuransi;
2. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
3. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya semacam itu dialokasikan dengan menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama. Metode alokasi biaya yang digunakan adalah metode rata-rata tertimbang atas dasar proporsi biaya langsung.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

1. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
2. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
3. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan kontraktor lainnya. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeur* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeur* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeur*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, makajenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman.

Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi sebagai biaya pinjaman.

D. PENYAJIAN

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari asset tetap. Berikut adalah contoh penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**NERACA**
NERACA ASET TETAP

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| **ASET** | | |
| **ASET LANCAR** | | |
| Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| Piutang Pajak | xxx | xxx |
| Piutang Retribusi | xxx | xxx |
| Penyisihan Piutang | xxx | xxx |
| Belanja Dibayar Dimuka | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| Piutang Lainnya | xxx | xxx |
| Persediaan | xxx | xxx |
| **Jumlah Aset Lancar** | **xxx** | **xxx** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | |
| **Investasi Nonpermanen** | | |
| Pinjaman Jangka Panjang | xxx | xxx |
| Investasi dalam Surat Utang Negara | xxx | xxx |
| Investasi dalam Proyek Pembangunan | xxx | xxx |
| Investasi Nonpermanen Lainnya | xxx | xxx |
| **Jumlah Investasi Nonpermanen** | **xxx** | **xxx** |
| **Investasi Permanen** | | |
| Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| Investasi Permanen Lainnya | xxx | xxx |
| **Jumlah Investasi Permanen** | **xxx** | **xxx** |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **xxx** | **xxx** |
| **ASET TETAP** | | |
| Tanah | xxx | xxx |
| Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx |
| Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx | xxx |
| Akumulasi Penyusutan | xxx | xxx |
| **Jumlah Aset Tetap** | **xxx** | **xxx** |
| **DANA CADANGAN** | | |
| Dana Cadangan | xxx | xxx |
| **Jumlah Dana Cadangan** | **xxx** | **xxx** |
| **ASET LAINNYA** | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxx | xxx |
| Aset Tak Berwujud | xxx | xxx |
| Aset Lain-lain | xxx | xxx |
| **Jumlah Aset Lainnya** | **xxx** | **xxx** |
| **JUMLAH ASET** | **xxx** | **xxx** |

E. PENGUNGKAPAN

Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

1. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
2. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
3. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
4. Uang muka kerja yang diberikan;
5. Retensi.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI DANA CADANGAN

A. UMUM

1. Definisi

Mengacu pada PSAP 01 Paragraf 8, dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk ke dalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Dana Cadangan | Dana Cadangan Pembangunan Jembatan |
| | Dana Cadangan Pembangunan Gedung |
| | Dana Cadangan Pembangunan Waduk |

| | |
|---|---|
| | Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada |
| | Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) |
| | Dst.... |

B. PENGAKUAN

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

C. PENGUKURAN

1. Pembentukan Dana Cadangan

   Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

2. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

   Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

3. Pencairan Dana Cadangan

   Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan bukudari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

D. PENYAJIAN DI LAPORAN KEUANGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**
**NERACA**
PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| No. | Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|---|
| 1 | **ASET** | | |
| 2 | | | |
| 3 | **ASET LANCAR** | | |
| 4 | Kas di Kas Daerah | xxx | xxx |
| 5 | Kas di Bendahara Pengeluaran | xxx | xxx |
| 6 | Kas di Bendahara Penerimaan | xxx | xxx |
| 7 | Investasi Jangka Pendek | xxx | xxx |
| 8 | Piutang Pajak | xxx | xxx |
| 9 | Piutang Retribusi | xxx | xxx |
| 10 | Penyisihan Piutang | xxx | xxx |
| 11 | Belanja Dibayar Dimuka | xxx | xxx |
| 12 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara | xxx | xxx |
| 13 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah | xxx | xxx |
| 14 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| 15 | Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| 16 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| 17 | Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 18 | Piutang Lainnya | xxx | xxx |
| 19 | Persediaan | xxx | xxx |
| 20 | **Jumlah Aset Lancar** | **xxx** | **xxx** |
| 21 | | | |
| 22 | **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | |
| 23 | **Investasi Nonpermanen** | | |
| 24 | Pinjaman Jangka Panjang | xxx | xxx |
| 25 | Investasi dalam Surat Utang Negara | xxx | xxx |
| 26 | Investasi dalam Proyek Pembangunan | xxx | xxx |
| 27 | Investasi Nonpermanen Lainnya | xxx | xxx |
| 28 | **Jumlah Investasi Nonpermanen** | **xxx** | **xxx** |
| 29 | **Investasi Permanen** | | |
| 30 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | xxx | xxx |
| 31 | Investasi Permanen Lainnya | xxx | xxx |
| 32 | **Jumlah Investasi Permanen** | **xxx** | **xxx** |
| 33 | **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **xxx** | **xxx** |
| 34 | | | |
| 35 | **ASET TETAP** | | |
| 36 | Tanah | xxx | xxx |
| 37 | Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| 38 | Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| 39 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | xxx | xxx |
| 40 | Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| 41 | Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx | xxx |
| 42 | Akumulasi Penyusutan | xxx | xxx |
| 43 | **Jumlah Aset Tetap** | **xxx** | **xxx** |
| 44 | | | |
| 45 | **DANA CADANGAN** | | |
| 46 | Dana Cadangan | xxx | xxx |
| 47 | **Jumlah Dana Cadangan** | **xxx** | **xxx** |
| 48 | | | |
| 49 | **ASET LAINNYA** | | |
| 50 | Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| 51 | Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| 52 | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxx | xxx |
| 53 | Aset Tak Berwujud | xxx | xxx |
| 54 | Aset Lain-laim | xxx | xxx |
| 55 | **Jumlah Aset Lainnya** | **xxx** | **xxx** |
| 56 | | | |
| 57 | **JUMLAH ASET** | **xxx** | **xxx** |
| 58 | | | |
| 59 | **KEWAJIBAN** | | |
| 60 | | | |
| 61 | **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | |
| 62 | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | xxx | xxx |
| 63 | Utang Bunga | xxx | xxx |
| 64 | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang | xxx | xxx |
| 65 | Pendapatan Diterima Dimuka | xxx | xxx |
| 66 | Utang Belanja | xxx | xxx |
| 67 | Utang Jangka Pendek Lainnya | xxx | xxx |
| 68 | **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **xxx** | **xxx** |
| 69 | | | |
| 70 | **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | | |
| 71 | Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan | xxx | xxx |
| 72 | Utang Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx |
| 73 | Premium (Diskonto) Obligasi | xxx | xxx |
| 74 | Utang Jangka Panjang Lainnya | xxx | xxx |
| 75 | **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang** | **xxx** | **xxx** |
| 76 | **JUMLAH KEWAJIBAN** | **xxx** | **xxx** |
| 77 | | | |
| 78 | **EKUITAS** | | |
| 79 | Ekuitas | xxx | xxx |
| 80 | **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA** | **xxx** | **xxx** |

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar hukum (peraturan daerah) pembentukaan dana cadangan;
2. Tujuan pembentukan dana cadangan;
3. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer kerekening dana cadangan;
5. Sumber dana cadangan; dan
6. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET LAINNYA

## A. UMUM

### 1. Definisi

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (*potential service*) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan.Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

### 2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Tagihan Jangka Panjang | Tagihan Penjualan Angsuran |
| | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Sewa |
| | Kerjasama Pemanfaatan |
| | Bangun Guna Serah |
| | Bangun Serah Guna |
| Aset Tidak Berwujud | Goodwill |

| | |
|---|---|
| | Lisensi dan Frenchise |
| | Hak Cipta |
| | Paten |
| | Aset Tidak Berwujud Lainnya |
| Aset Lain-lain | Aset Lain-Lain |

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan SKPK.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

a. Tagihan Jangka Panjang;

b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan

c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPK meliputi:

a. Aset Tak Berwujud; dan

b. Aset lain-lain.

B. PENGAKUAN

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai

dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset

pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintahdaerahuntuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. Goodwill

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah.Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

d. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkanperjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai

aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset* – w*ork in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan

b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. PENGUKURAN

1. Tagihan Jangka Panjang

a. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;

b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

   1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

   2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;

   3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.

c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

AMORTISASI

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dikukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

D. PENYAJIAN

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Berikut adalah contoh penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah.

**NERACA**

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| ASET | | |
| ASET TETAP | | |
| Tanah | xxx | xxx |
| Peralatan dan Mesin | xxx | xxx |
| Gedung dan Bangunan | xxx | xxx |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | xxx | xxx |
| Aset Tetap Lainnya | xxx | xxx |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | xxx | xxx |
| Akumulasi Penyusutan | (xxx) | (xxx) |
| Jumlah Aset Tetap | **xxx** | **xxx** |
| DANA CADANGAN | | |
| Dana Cadangan | xxx | xxx |
| Jumlah Dana Cadangan | **xxx** | **xxx** |
| ASET LAINNYA | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | xxx | xxx |
| Tuntutan Perbendaharaan | xxx | xxx |
| Tuntutan Ganti Rugi | xxx | xxx |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | xxx | xxx |
| Aset Tak Berwujud | xxx | xxx |
| Aset Lain-Lain | xxx | xxx |

E. PENGUNGKAPAN

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Besaran dan rincian aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
d. Informasi lainnya yang penting.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

## A. UMUM

### 1. Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

### 2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

| | |
|---|---|
| Kewajiban Jangka Pendek | Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |
| | Utang Bunga |
| | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang |
| | Pendapatan Diterima Dimuka |
| | Utang Belanja |
| | Utang Jangka Pendek Lainnya |
| Kewajiban Jangka Panjang | Utang Dalam Negeri |
| | Utang Jangka Panjang Lainnya |

## B. PENGAKUAN

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)
   Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
2. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)
   Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
3. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)
   Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
4. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)
   Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

C. PENGUKURAN

Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya. Berikut ini akan dijabarkan mengenai pengukuran untuk masing-masing pos kewajiban.

Pengukuran kewajiban atau utangjangka pendek pemerintah daerah berbeda-beda berdasarkan jenis investasinya. Berikut ini akan dijabarkan bagaimana pengukuran kewajiban untuk masing-masing jenis kewajiban jangka pendek.

1. Pengukuran Utang kepada Pihak Ketiga

   Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu pemerintah daerah mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut. Contoh: Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan.

2. Pengukuran Utang Transfer

   Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Pengukuran Utang Bunga

   Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

4. Pengukuran Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

   Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.

5. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

   Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

6. Pengukuran Kewajiban Lancar Lainnya

   Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut. Contoh: biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Kewajiban atau utang jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1. Utang yang tidak diperjualbelikan

   Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari *World Bank*.

2. Utang yang diperjualbelikan

   Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga

premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

D. PENYAJIAN

Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva. Berikut adalah contoh penyajian kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dalam Neraca Pemerintah Daerah.

**NERACA**

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

(Dalam Rupiah)

| Uraian | 20X1 | 20X0 |
|---|---|---|
| **KEWAJIBAN** | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | |
| Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | xxx | xxx |
| Utang Bunga | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Utang Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx |
| Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya | xxx | xxx |
| Utang Jangka Pendek Lainnya | xxx | xxx |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **xxx** | **xxx** |
| **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | | |
| Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat | xxx | xxx |
| Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya | xxx | xxx |
| Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank | xxx | xxx |
| Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan bukan Bank | xxx | xxx |
| Utang Dalam Negeri - Obligasi | xxx | xxx |
| Utang Jangka Panjang Lainnya | xxx | xxx |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang** | **xxx** | **xxx** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **xxx** | **xxx** |

E. PENGUNGKAPAN

Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
   a. Pengurangan pinjaman;
   b. Modifikasi persyaratan utang;
   c. Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
   d. Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
   e. Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
   f. Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
6. jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
7. biaya pinjaman:
   a. Perlakuan biaya pinjaman;
   b. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   c. Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

## A. UMUM

### 1. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan peyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

### 2. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

b. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

## B. PERLAKUAN

1. Kesalahan tidak berulang

a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahanjenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

2. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi ataupun tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN

# PENYAJIAN KEMBALI (RESTATEMENT) NERACA

## A. DEFINISI

PSAP 10 – Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (*cash toward accrual*). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan,di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam

persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;

4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;
8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

B. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dst

2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

C. JURNAL STANDAR

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut :

| URAIAN | AKUN | DEBIT | KREDIT |
|---|---|---|---|
| Penyajian kembali nilai wajar piutang | EKUITAS<br>CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual) | XXX | <br>XXX |
| Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka | Beban Dibayar dimuka<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka) | XXX | <br>XXX |
| Penyajian kembali nilai persediaan | Persediaan<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknya) | XXX | <br>XXX |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek | Investasi Jangka Pendek<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek) | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang | Investasi Jangka panjang<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian) | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilaibuku aset tetap | EKUITAS<br>Akumulasi penyusutan<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan) | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilaibuku aktiva tidak berwujud | EKUITAS<br>Akumulasi Amortisasi<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan) | XXX | XXX |
| Penyajian kembali nilai utang jangka pendek | EKUITAS<br>Utang Bunga jk pendek<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek) | XXX | XXX |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Penyajian kembali nilai utang jangka panjang | EKUITAS<br>Utang Bunga jk panjang<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang) | XXX | <br>XXX |
| Penyajian kembali nilai Ekuitas | EKUITAS DANA<br>EKUITAS<br>(untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas) | XXX | <br>XXX |

**BUPATI BIREUEN,**

**RUSLAN M. DAUD**